PERAN DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA BUKITTINGGI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMKM KOTA BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE) pada program studi ekonomi islam

Disusun Oleh
MUTIA RANI
3221142

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SJECHM.DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

Surat Pernyataan Orsinalitas



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mutia Rani
NIM	: 3221142
Tempat/Tanggal Lahir	: Lambau/ 14 Juli 2001
Jurusan	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota Bukittinggi

Menyatkan dengan ini sesungguhnya karya ilmiah (Skrispsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dengan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

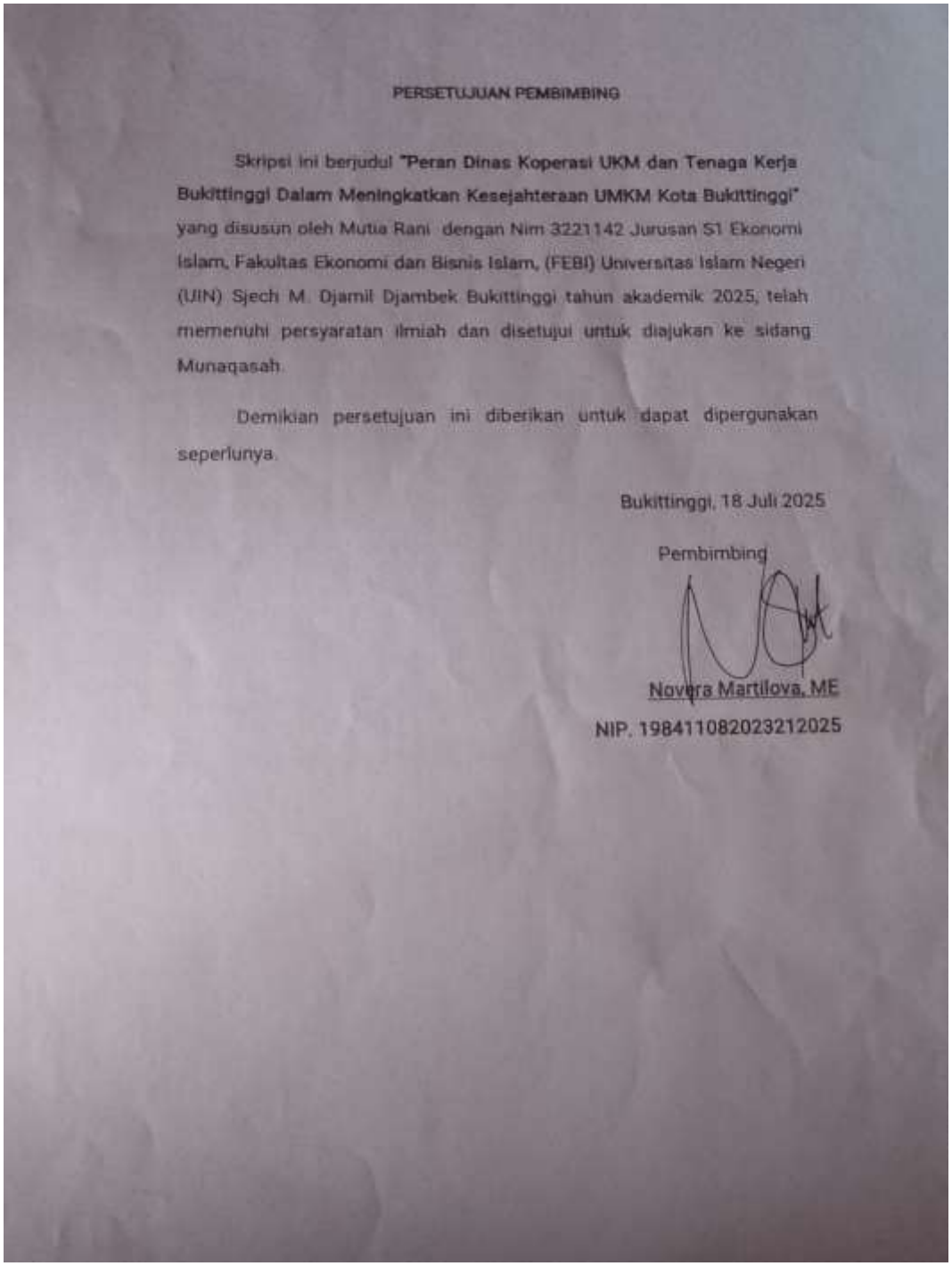
Bukittinggi, 23 Juni 2025

Penulis

Mutia Rani

NIM. 3221142

Persetujuan Pembimbing



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **"Peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota Bukittinggi"** yang disusun oleh Mutia Rani dengan Nim 3221142 Jurusan S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun akademik 2025, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 18 Juli 2025

Pembimbing

Novera Martilova, ME

NIP. 198411082023212025

Abstrak

Skripsi ini berjudul "**Peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota Bukittinggi."** yang disusun oleh Mutia Rani dengan nim 3221142 Jurusan S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi bahwasanya penulis ingin mengetahui Peran Dnas Koperasi Ukm dan Tenaga kerja Bukittinggi dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota Bukittinggi. Dan penulis ingin melihat meningkat atau tidaknya UMKM di Kota Bukittinggi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi. Masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi seperti daya beli pada masyarakat yang rendah pada sektor UMKM, belum optimalnya pengembangan UMKM sesuai potensi daerah dan peserta pelatigan UMKM yang mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan data primer dan data sekunder, denfan teknik penumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitunpengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui baha Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi cukup berhasil meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Kota Bukittinggi dengan melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM Kota Bukittinggi. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan sebagai bukti nyata capaian Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi yaitu, memberikan pelatihan dan edukasi kepada pelaku UMKM. Membantu mempromosikan produk buatan UMKM, mendukung permodalan UMKM mlalui program Tabungan Ustman dan melakukan monitoring ke lapangam pelaku UMKM.

Kata Kunci*: Peran, kesejahteraan UMKM, pelatihan dan pendampingan*

KATA PENGANTAR||



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Kemudian shalawat dan salam, penulis ucapkan buat junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan Bagaimana Peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga kerja Bukittinggi terhadap kesejahteraan UMKM. Adapun judul skripsi ini adalah "**Peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota Bukittinggi"**

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis mengakui bahwa proses penuyusnan skripsi ini tidak akan terlepas dari bantuan dari berbagai pihak terutama kepada kelurga penulis yakni Ayahanda **Rafrial** dan Ibunda **Noni Astuti** yang telah memberikan kasih tiada tara,mengasuh, memotivasi lahir bathin serta mendidik dengan penuh cinta agar penulis menjadi manusia yang berguna baik di dunia maupun di akhirat.

Peniulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Maka izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini di antaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Silvia Hanani, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Beserta Jajaran.

2. Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajaran.
3. Ibu Rika Widianita S, ME selaku kepala program studi ekonomi dan bisnis islam negeri (UIN) sjech m.djamil djambek bukittinggi yang telah membantu segala urusan di program studi.
4. Septria Susantii, S,Pd, ME selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa membeimbing dari awal proses perkuliahan sampai akhir semester.
5. Ibu Novera Martilova, ME selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, perhatian, kesabaran, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Mhandrik, S.STP., M.Si selaku Pimpinan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi yang telah memberikan izin untuk penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Dan Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Bukittinggi

Penulis menyadari bahwa penulian skripsi ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selsnjutnya dan masyarakat banyak.

Bukittinggi,12 Juli 2024

Mutia Rani

Nim: 3221142

DAFTAR ISI

SURAT ORSINALITAS ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
HALAMANPERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Batasan Masalah 5
D. Rumusan Masalah 5
E. Tujuan Dan Manfaat 5
F. Penjelasan Judul 6
BAB II LANDASAN TEORI **8**
A. UMKM. 8
1. Pengertian UMKM 8
2. Pengembsangan UMKM 10
3. CIri-ciri UMKM 12
4. Karakteristik UMKM 13
5. UMKM Dalam Perspektif Islam 14
6. Karaktrristik UMKM Menurut Perspetif Islam 18
B. Kesejahteraan 18
1. Pengertian Kesejahteraan 25
. Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam 30
3. Kesejahteraan dimasa Rasulullah dan Sahabatnya 30
4. Kesejahteraan UMKM 31
C. Kajian Terdahulu 33
BAB III METODE PENELITIAN **37**
A. Jenis Penelitian 37

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 38
C. Jenis Data 38
D. Teknik Pengumpulan Data 42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL 47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 47
1. Sejarah Berdirinya Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Bukittinggi 47
2. Pokok dan Fungsi 47
3. Struktur Organisasi 48
B. Peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi Dalam MeningkatKan Kesejahteraan UMKM KotaBukittinggi 53
C.Tantaan Yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UKM daTenaga Kerja Bukittinggi selama Melaksanakan Perannya 58
BAB V PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji serta syukur kepada allah SWT. Taburan Rahman dan RahimMu telah memberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan serta membekali ku dengan ilmu pengetahuan. Atas karunia dan rahmat serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat terselesaikan. Shalawat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada rasulullah Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Ku persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini kepada orang yang ku sayangi dan ku kasihi.

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibunda (Noni Astutii) dan Ayahanda Rafrial) yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan, ridho, dan cinta kasih sayang yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena ku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyiram kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik. Terimakasih Ibu, terimakasih ayah.
3. Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini kepada kakakku (Ahmad Kafli) dan Adik-Adikku (Putri Maharani) dan (Muhammad Fahrezi). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga doa semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula.
4. Untuk keluarga besar Ibunda, Makgek, Maknek,Maktuo, Makdang, Antedan adik-adik penulis merasa terima kasih telah membantu dan memberi dukungan selama ini.
5. Untuk keluarga besar Ayahanda, Nenek, Apak, Paknek, Ante dan adik-adik penulis merasa terima kasih telah membantu dan memberi dukungan selama ini.

6. Untuk uncu penulis Nirva Nita penulis merasa terima kasih telah membantu dan memberi dukungan selama perkuliahan dan sampai di titik ini, semoga selalu di berikan kemudahan rezeki dan sehat selalau.

7. Untuk sahabat penulis selama di perkuliahan serta seperjuangan Icha Azharul Jannah terimakasih sudah menjadi bagian cerita penulis selama perkuliahan, dan kemana-mana selalu berdua, semoga kita bisa wisuda bareng ya, dan semoga sukses untuk kita.

8. Untuk Ismail penulis yang selalu mensupor penulis dalam menyleseikan skripsi ini, semoga kita bisa sama-sama sukses kedepannya dan membahagiakan orangtua kita

9. Untuk teman penulis yang selalu bisa membantu penulis dalam hal apapun Dolly Gustia terimakasih banya penulis ucapkan, semoga kita sama-sama sukses kedepannya.

10. Untuk semua teman-teman seperjuangan manajemen haji dan umrah 2021, terkhususnya kepada Ekonomi Islam 2021 D yang sudah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Dan bagi pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut andil dalam penyelesain skripsi ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. **Latar Belakang Masalah**

Pada negara berkembang, pembangunan nasional menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan di negara, jika pembangunan ekonomi berhasil, maka bidang lainnya seperti industri, hukum , politik, pertanian, dan lain-lain akan terbantu. Begitupun dengan bangsa Indonesia, salah satu yang sangat diperhatikan pada pembangunan nasional adalah pada bidang ekonomi. Ekonomi yang terus bergejolak pada saat ini membuat masyarakat merasakan beban kehidupan yang berat.

Begitu halnya dengan bangsa Indonesia, salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah dibidang ekonomi. Ekonomi yang terus bergejolak membuat masyarakat semakin merasakan beban kehidupan yang semakin berat. Semua sektor kehidupan mengarah pada industrialisasi yang akhirnya berujung pada peningkatan keuntungan sebagai patokan utamanya, hal ini menyebabkan berkurangnya empati masyarakat dengan lingkungan sekitar. Keadaan seperti ini memaksa masyarakat mengharuskan beradaptasi agar dapat bertahan hidup dimana keadaan yang dimaksud adalah industrialisasi yang terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat.

Islam telah menganjurkan masyarakat muslim untuk membentuk sistem ekonomi dengan apa yang telah diajarkan. Hal ini juga dibuktikan dalam QS Al-Jumu’ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al-Jumu'ah/62:10)[1]

[1] Al-qur’an surat Al-jumu’ah ayat 10

Ayat tersebut menganjurkan untuk melakukan bisnis yang halal dan bermanfaat, memenuhi kewajiban utama untuk bertakwa dan meminta bantuan Allah Ta'ala dalam segala upaya yang dilakukan..

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu prioritas pengembangan di setiap Negara. Hal ini disebabkan oleh besarnya sumbangsih UMKM terhadap Negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara, UMKM sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja sektor informal dan pemerataan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program pendukung telah dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Kebijakan dan program pendukung tersebut bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan UMKM melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Peran UMKM bukan hanya dirasakan oleh Negara berkembang saja. Negara-negara maju pun mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan oleh karena adanya pertumbuhan UMKM.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan, yang mana usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif dan mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum dan bukan oleh anak perusahaan atau cabang perusahaan dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan tidak memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).[2]

UMKM di Kota Bukittinggi berperan penting dalam perekonomian lokal, dengan ribuan pelaku usaha yang menghasilkan produk-produk berkualitas dan diminati wisatawan. Pemerintah Kota Bukittinggi juga terus mendukung UMKM melalui berbagai program seperti Tabungan Utsman dan subsidi untuk permodalan. UMKMdi Bukittinggi memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian lokal. Ribuan UMKM yang tersebar di berbagai penjuru kota ini menyediakan

[2] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menghasilkan produk-produk berkualitas yang diminati wisatawan. Kegigihan dan kreativitas para pelaku UMKM patut diapresiasi, karena mereka telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi Minangkabau.

UMKM memegang peranan strategis yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Melihat peran UMKM dalam pembangunan, maka perlu dikembangkan, saling melengkapi, bersama-sama memperkuat usaha , mengupayakan pemerataan pendapatan masyarakat yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Masyarakat sebagai kontributor utama pembangunan, dan pemerintah memiliki tugas untuk membimbing, mengarahkan dan mengembangkan usahanya. Peranan usaha kecil sangat penting dalam upaya membangun perekonomian nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Adapun masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Bukittinggi saat ini adalah ‘daya beli pada masyarakat yang rendah pada sektor UMKM’ yang menyebabkan penurunan pada penjualan sehingga pendapatn juga mengalami penurunan dan juga menyebabkan usahaUMKM kesulitan dalam mengakses pasar, sehingga mempengaruhi kemampuan usaha UMKM untuk bersaing dengan usaha lain.

Adapun permasalahan lain yang dihadapi pelaku UMKM yaitu ‘kurangn optimalnya pengembangan umkm di kota bukittini dan kurangnya pengetahuan mengenai cara mempromosikan serta untuk mendukung penyediaan alat produksi yang lebih memadai. Dengan demikian, dibutuhkan upaya yang lebih serius untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan dan dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Tabel 1.1
Data UMKM & Peserta Pelatihan Kegiatan UMKM
Tahun 2022-2024

No	Th	Jumlah UMKM	Rata-Rata UMKM Yang Mengikuti Pelatihan
1	2022	7. 473	194,3
2	2023	7.473	37
3	2024	7.553	278, 85

Terlihat pada data tersebut jumlah UMKM secara keseluruhan pada tahun 2022 sebanyak 7. 473. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami *stuck* sebanyak 7.473, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi menjadi 7. 553.
Sedangkan dilihat dari rata-rata peserya yang mengikuti pelatihan pada Dinas Koperasi UKM Dan Tenaga Kerja Bukittinggi di tahun 2022 adalah sebanyak 194,3. Lalu di tahun mengalami penurunan 37. Kemudian, pada tahun 2024, jumlah rata-rata UMKM meningkat kembali menjadi 278. 85.

Adapun alasan penulis memilih Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi sebagai lokasi penelitian adalah pertama karena masalah yang ingin penulis kaji adalah sesuai kondisi masyarakat bukittinggi yaitu bagaimana Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi dalam meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota aka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Peran Dinas Koperasi, **UKM & Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota Bukittinggi".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah saya sampaikan dalam bagian latar belakang, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan UMKM sesuai potensi daerah
2. Daya beli masyarakat yang rendah pada sektor usaha UMKM.
3. Peserta pelatihan UMKM mengalami fluktuasi selama 3tahun terakhir.

C. Batasan Masalah

Agar penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis memberikan batasan masalah, memfokuskan penelitian pada Peran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi dalam meningkatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bukittinggi?
2. Apa saja kendala dan solusi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Bukittinggi selama menjalankan perannya?

E. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui serta menjelaskan bagaimana peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi terhadap pelaku usaha UMKM di Kota Bukittinggi.

b. Mengetahui apa saja kendala dan solusi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi selama menjalankan Perannya.

2. Mamfaat Penelitian

a. Penelitian ini bermamfaat bagi pelaku UMKM masyarakat Bukittinggi dengan memberikan informasi tentang peluang dan fasilitas yang dapat di mamfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program-program yang disediakan pemerintah.

b. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Tenaga Kerja yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

F. Penjelasan Judul

Untuk memberikan pemahaman lebih tentang **“ Peran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota Bukittinggi”,** berikut penjelasan instilah dari judul penelitian yaitu:

Peran : Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki dalam jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan peran fungsinya sesuai posisi yang di dudukinya.

dan Tenaga Kerja: adalah instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan sektor koperasi, usaha Kecil dan menengah (UKM), serta pengelolaan tenaga kerja di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

Meningkatkan : Maksud dari frasa "dalam meningkatkan" adalah menunjukkan suatu proses atau usaha yang bertujuan untuk memperbaiki atau membuat sesuatu menjadi lebih baik, lebih berkembang, atau lebih efektif. Frasa ini menunjukkan bahwa ada kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu kemajuan atau perbaikan pada suatu kondisi, kualitas, atau hasil tertentu.

Kesejahteraan : Kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat merasa aman, sentosa, makmur, dan memiliki kualitas hidup yang baik, baik dalam aspek material, sosial, maupun spiritual.

UMKM : UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.UMKM adalah usaha produktif yang dijalankan perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, seperti jumlah aset dan omzet, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada PDB, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Kota Bukittinggi: Kota Bukittinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar

kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sebagai enklave dari Kabupaten Agam, kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatra dan Provinsi Sumatra Tengah.

BAB II
Landasan Teori

a. UMKM

1. Pengertian UMKM

UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam memerankan berbagai kepentingan pembangunan dan peningkatan ekonomi secara riil. Hal ini dibuktikan melalui penciptaan usaha baru sehingga membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan. Sehingga diharapkan sebagai outputnya adalah jumlah pengangguran mengalami penurunan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi sangat strategis. Didukung dengan keadaan dimana sebagaian besar aktivitas masyarakat Indonesia berperan dalam kegiatan berbagai unit ekonomi dalam skala UMKM.[3]

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih mengganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengguna perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminator ekonomi pasca krisis.[4]

Didasarkan atas kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 2009 mencanangkan tahun industri kreatif yang diyakini merupakan industri

[3] Rintan Saragih. *Menelusuri Penyebab Lambayang Perkembangan UMKM di Desa Baru dan DusunTuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Kewirausahaan Vol. 5, No. 1

[4] Medriyansah, *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, 2019 hal 3

penggerak sektor rill ditengah ancaman melambatnya perekonomian akibat krisis global. Melalui impress No.6 tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk medukung kebijakan pengembangan industri kreatif tahun 2009-2015 yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.[5]

Sebagaimana pemacu pembangunan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor mikro, keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian.

UMKM selama ini dapat terbukti sebagai kutup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme pencipta lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan UMKM berarti memperkokoh bisnis di masyarakat.[6]

UMKM juga memanfatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UMKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besarterhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Defenisi UMKM berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dan berbeda pula definisi yang dibuat oleh berbagai lembaga dunia. Tidak ada suatu kesepakatan terhadap definisi UMKM. Umumnya, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yan

---

[5] Bachtiar Rifai, *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*" jurnal Sosio Humaniovora Vol.3 No.4, septrmber

[6] Tulus T.H Tambunan "*UMKM di Indonesia* " (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019)hlm 17

digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan Iain-lain.[7]

2. Pengembangan UMKM

Pengembangan dan Strategi Pemberdayaan Yang Tepat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) barangkali merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara. Terbukti dimasa krisis dengan bertumbangannya banyak usaha konglomerasi yang dililit hutang luar negeri, usaha kecil menengah terutama yang berorientasi eksport justru meraup keuntungan yang luar biasa. Sebagian lagi survive dengan berbagai cara karena kecilnya investasi dan modal yang berputar.

Akan tetapi masih banyaknya masalah yang dihadapi oleh pihak UMKM dalam rangka mengembangkan usahanya perlu mendapatkan perhatian khusus bukan hanya dari pihak pemerintah saja. Dengan kata lain bahwa persoalan kurang berkembangnya dan terperhatikannya sektor ekonomi UMKM tersebut kiranya jangan hanya ditumpukan pada tanggung jawab salah satu lembaga ekonomi saja, misalnya hanya pada sektor perbankan dalam kaitannya dengan permasalahan pendanaan. Jadi seharusnya ditumpukan dan menjadi tanggung jawab dari seluruh lembaga-lembaga ekonomi lannya.

Oleh karena itu hal yang penting untuk dibahas adalah bagaimana seharusnya peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga ekonomi tersebut dalam memberdayakan atau mebangun sektor ekonomi UMKM tersebut. Pertama, mungkin dapat dipahami bahwa sebenarnya lembaga yang paling bertanggung jawab adalah untuk mengembangkan sektor ekonomi UMKM adalah pemerintah. Karena secara ”*de facto dan de jure*”, pemerintahlah yang seharusnya terlebih dulu menunjukan ”political will dan political action-nya” secara konkrit dalam komitmennya untuk berpihak secara nyata kesektor UMKM. Dimana hal tersebut seharusnya sudah tertuang dalam ”blue print”

[7] Feni Dwi Anggraini, Imam Hardjanto, Hainul Hayat. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).* Jurnal Adminidtrasi Publik (JAP), Vol 1 No 6

kebijaksanaan pembangunan diwilayahnya masing-masing. [8]Dalam hal ini pemerintah daerah misalnya, harus mampu berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator, koordinator atupun regulator demi untuk merealisasikan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada UMKM.

Diantaranya, pemerintah melalui dinas-dinasnya dibawah koordinasi BAPPEDA harus mampu menyusun dan menerbitkan ”land scape” atau peta potensi sektor ekonomi UMKM ini secara jelas dalam berbagai aspeknya, yang nantinya dapat dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga lainnya untuk mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan secara tepat.Kedua, dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga dunia usaha, baik pengusaha UKMKM maupun pengusaha besar, mereka selalu harus berupaya secara mandiri dan sukarela untuk melakukan langkah-langkah strategis dan realistis dalam berusaha. Diantaranya bagi pengusaha UMKM, meraka harus selalu berupaya meningkatkan ketrampilan atau pengetahuan berusahanya, baik dibidang produksi, manajemen maupun pemasarannya. Atau melakukan aliansi usaha secara profesional baik dengan pengusaha sektor UMKM, maupun dengan sektor-sektor usaha lainnya, dalam bidang-bidang yang telah disebutkan. Kemudian mereka harus selalu berusaha dapat memenuhi syarat-syarat minimal agar dapat akses kelembaga-lembaga perbankan.

Sedangkan bagi pengusaha besar didaerah, kiranya mereka berusaha menyertakan sektor ekonomi UMKM sebagai partner berusaha secara fungsional atas dasar saling menguntungkan. Serta kiranya pengusaha besar tersebut berusaha melakukan investasi berkenaan dengan pemberdayaan sektor atau potensi sumber daya lokal unggulan utamanya dalam industri pengolahan dengan melibatkan sektor UMKM. Atau kiranya para pengusaha besar dapat berperan sebagai penjamin pendanaan pada sektor perbankan, oleh karena adanya keterkaitan

[8] Marsuki. *Pemikiran dan Strategi Memberdaykan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2006) hlm. 21

kegiatan atau usaha diantara mereka.Ketiga, dalam kaitannya dengan lembaga keuangan dan perbankan. Kiranya dengan adanya UU otonomi daerah maka sektor perbankan yang ada didaerah dapat melakukan beberpa penyesuaian kebijaksanaan baik dari kepentingan Bank Indonesia agar dapat mengakomodasi semangat UU Otonomi Daerah agara dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal. Berdasarkan ketiga alasan diatas sebetulnya pemerintah saat ini telah menjalankan strategi pemberdayaan UMKM tersebut yang dapat diklasifikasikan kedalam:

a. Aspek manajerial yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omset/ tingkat utilitas/ tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemsaran, dan pengembangan sumber daya manusia.
b. Aspek permodalan yang meliputi: bantuan moral (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit mini/ Midi, KKU)
c. Mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan besar, baik melalui sistem Bapak–Anak Angkat. PIR, keterkaitan hulu-hilir (Forward linkage), kerekaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura ataupun subkontrak.

3. Ciri-Ciri UMKM

Terdapat beberapa ciri UMKM, yaitu sebagai berikut:[9]

a. Jenis komoditi yang diusahakan tidak tetap dan bisa berganti sewaktu-waktu.
b. Tempat menjalankan usahanya sewaktu-waktu bisa berpindah.
c. Belum menerapkan kegiatan administrasi dalam menjalankan usahanya, bahkan seringkali tidak bisa membedakan keperluan keuangan untuk pribadi maupun keuangan usaha.

[9] Ade Resalawati, "*Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*." (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019): 31

d. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni.
e. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah.
f. Para pelaku UMKM biasanya belum mempunyai jaringan perbankan, akan tetapi sebagian dari mereka telah mempunyai jaringan ke lembaga-lembaga keuangan bukan bank.
g. Umumnya para pelaku usaha kecil belum mendapatkan bukti legalitas atau surat ijin usaha, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP).

4. Karakteristik UMKM

Karakterisitk Usaha Mikro Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah di dapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efesien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengolah usaha tersebut. Diterangkan dalam buku Panji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut: sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.

Kadang kala pembukuan tidak di update sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.

a. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
b. Modal terbatas.

c. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
d. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efesiensi jangka panjang.
e. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

5. UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam konsep ekonomi Islam, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting. Prinsipprinsip ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah, yang sesuai dengan filosofi di balik keberadaan UMKM. UMKM bukan hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial Islam, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memperkuat perekonomian lokal sambil memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial dalam masyarakat Dalam perspektif ekonomi Syariah, penting untuk memastikan regulasi yang mendukung keadilan dan keberlanjutan. Regulasi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UMKM, menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan berkeadilan.[10]

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam perspektif Islam dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa aspek penting dalam perspektif Islam meliputi:

a. Keadilan Ekonomi: UMKM dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan.
b. Kemitraan dan Kerjasama: Islam mendorong kemitraan dan kerjasama dalam berbisnis. UMKM dapat memanfaatkan

[10] Isnaini Haraharap. Signifikan Peranan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah. Volume 718 6 Nomor 2 2023.. Hlm 720

prinsip-prinsip seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama usaha).

c. Etika Bisnis: Islam menekankan pentingnya etika dalam berbisnis, seperti jujur, amanah, dan tidak menipu. UMKM harus menjalankan usahanya dengan integritas dan transparansi.
d. Pemberdayaan Masyarakat: UMKM dapat berperan dalam memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
e. Zakat dan Sedekah: UMKM yang sukses dapat memberikan kontribusi pada masyarakat melalui zakat dan sedekah, yang merupakan kewajiban dalam Islam untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, UMKM dapat menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

Salah satu usaha meningkatkan ekonomi masyarakat dan membantu msyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan adalah mendirikan UMKM. Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan ekonomi sosial. dalam Islam sangat dianjurkan untuk bekerja dengan bekerja manusia dapat mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang lebih baik lagi. Menurut Islam distribusi barang juga merupakan suatu pekerjaan yang banyak menguntungkan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis usaha tersebut, distribusi barang dianjurkan dalam islam dan melarang untuk menimbun barang dimana tujuan penjual yang menimbun barang ialah untuk menaikkanharga setelah barang tersebut menjadi sedikit hal ini yang akan merugikan pembeli, dan apabila barang di distribusikan secara baik maka banyak menimbulkan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Dalam ekonomi syariah UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah,

menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku pada semua orang tanpa membeda-bedakan pangat, status dan jabatan seseorang. Mujahid mengatakan bahwa hal ini merupakan ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang menentang perintah-perintahnya, bahwa amal perbuatan mereka kelak akan ditampilkan dihadapan Allah SWT. Dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin. Hal ini pasti kelak di hari kiamat, seperti yang disebutkan oleh Allah SWT.

6. Karakteristik UMKM Menurut Prespektif Ekonomi Islam

Dalam syariah, telah di atur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halalharam) dan setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus dalam kesesatan.

Berikut adalah karakteristik usaha mikro menurut prespektif ekonomi syariah:

a. Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun rabbaniyyum), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.
b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (iqhtisadun aqdiyyun), mengingat ekonomi islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah islamiah (al-aqidah al-islamiyyah) yang di dalamnya akan dimintakan pertanggung jawaban terhadap akidah yang diyakininya.
c. Berkarakter ta'abbudi (thabi abbudiyun). Mengingat usaha mikro Islam itu merupakan taat aturan yang berdimensikan ketuhanan (nizham rabbani).
d. Terkait erat dengan akhlak (murtabthun bil-akhlaq), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam

lindungan Islam yang tanpa akhlak.

e. Elastic (al-murunah), al-murunah didasarkan pada kenyataan bahwa baik AlQur'an maupun Al-Hadits, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.
f. Objektif (al-maudhu iyyah), Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.
g. Realistis (al-waqi'iyyah). Prakiraan (forcasting) ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek sisi yang lain.
h. Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (alamwal) tidaklah bersifat mutlak.
i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid istikhdam almal).

Usaha dalam Ekonomi Islam Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu.

Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusian. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya al-iktisabfi alrizq al-mustathab seperti yang dikutip oleh Adi Warman Azwar Karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Bekerja merupakan saran untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, oleh sebab itu hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.

Bekerja atau berusaha adalah usaha maksimal yang dilakukan

manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseroan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).11Salah satu usaha adalah memproduksi, dimana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilakn barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu, dengan ciriciri utama.

b. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan secara umum

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan." Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteksbudaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna

[11] Yusup Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam "* (Jakarta: Gema Insan Pers, 1977): 104-105

yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya. [12]

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.[13]

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide negara kesejahteraan barat ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis. 16 Di pihak lain, penulis-penulis Marxist mengatakan bahwa negara kesejahteraan hanyalah sedikit melebihi usaha untuk mengurangi ekses-ekses yang lebih buruk dari kapitalisme. Mereka mengatakan bahwa negara kesejahteraan sedikitpunbukan merupakan negara sosialis. Hal ini karena di negara kesejahteraan paling maju, sistem ekonomi tetap dimiliki dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan swasta. Jadi negara kesejahteraan berbeda dengan sistem sosilais menurut golongan Marxist yang sistem ekonominya dikuasai oleh swasta.[14]

Kelompok yang tidak menyetujui gagasan kapitalisme maupun sosialisme memberikan definisi tersendiri tentang kesejahteraan. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah pembentukan sosial yang unik berdasarkan prinsip-prinsip neo-merkantilis. Negara kesejahteraan merupakan konsensus kesejahteraan atau kompromi demokratis sosial. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian historis antara kapitalisme dan sosialisme. Dalam konteks teori kewarganegaraan, kesejahteraan diartikan sebagai puncak dari evolusi hak-hak kewarganegaraan. Masyarakat Barat yang demokratis berkembang bermula dari hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan hak-hak sipil, politik, dan sosial. Ketika hak-hak sipil mulai

---

[12] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosia*l (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal 8

[13] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosia*l (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal 9

[14] Agung Eko Purwana. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Stain Ponorogo Vol. 11. 1 Januari 2014

diterapkan secara lebih luas, maka pengertian kewarganegaraan menuntut untuk dipenuhi secara penuh akan hak-hak sosialnya. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai anggota masyarakat yang penuh dan sederajat kalau kehidupannya dalam kemiskinan, menempati rumah yang tidak layak dihuni, kesehatannya tidak terjaga dengan baik, dan berpendidikan tidak memadai.

Kesejahteraan dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “cetera” yang berarti paying. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “cetera” (paying) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.[15]

Kesejahteraan adalah kemakmuran dan kebahagiaan manusia baik individu maupun kelompok kecil seperti keluarga. Keadaan sejahtera ini diperlihatkan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki dalam memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kebutuhan hidup.[16]

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social (UU No. 11 Tahun 2009).

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan social adalah Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai

---

[15] Nurul Husna, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Jurnal Italic, Volume 20,No. 29, Januari-Juni 2014, hal.46

[16] Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar KecamatanTalawi* BatubaraJurnalGeografi,Volume9,No.1,2017,hlm.57.https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/view/6038, (Diakses pada tanggal 24 Juni 2024)

kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan social. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keterbatasan indikator ekonomi dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator ekonomi tersebut pada umumnya diukur secara obyektif dengan pendekatan berbasis uang. Kebahagiaan merupakan suatu hal yang eh dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang, karena itu pengukuran kebahagiaan merupakan hal yang subyektif.

Kebahagiaan menggambarkan indikator kesejahteraan subyektif yang digunakan untuk melengkapi indikator obyektif. Berbagai penelitian tentang indeks kebahagiaan mengaitkan kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan subyektif dengan komponen kepuasan hidup dan emosi positif. Dalam konteks pemanfaatan indeks kebahagiaan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan publik, maka komponen kebahagiaan yang digunakan adalah kepuasan hidup. Pengembangan indikator untuk mengukur tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks Kebahagiaan Indonesia dirilis pertama kali pada tahun 2013 berdasarkan hasil studi dengan representasi estimasi tingkat nasional. Pada tahun 2014, BPS kembali melaksanakan pengukuran tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia melalui Survei

Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2014 dengan cakupan sampel yang dapat digunakan untuk estimasi tingkat nasional maupun provinsi.

Dalam konteks yang lebih luas, kesejahteraan dapat mencakup dalam beberapa hal sebagai berikut:

- Kesejahteraan sosial, yaitu keadaan sosial yang memungkinkan setiap warga negara memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial mereka dengan baik.
- Kesejahteraan ekonomi, yaitu dimana kondisi dimana masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, dan aset.
- Kesejahteraan lingkungan yaitu kondisi lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Beberapa temuan menarik yang dihasilkan dari indeks kebahagiaan Nusa Tenggara Barat berdasarkan karakteristik demografi dan ekonomi, yaitu:

- Pertama, Indeks kebahagaian penduduk di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan,
- Kedua, Penduduk berstatus menikah mempunyai indeks kebahagiaan paling tinggi, mereka berstatus cerai lebih rendah indeks kebahagiaannya, yaitu cerai hidup lebih rendah indeks kebahagiaannya daripada cerai mati,
- Ketiga, Penduduk umur dibawah 24 tahun memiliki indeks kebahagiaan tertinggi, sementara, penduduk lansia (kelompok umur 65H) mempunyai indeks kebahagiaan paling rendah.
- Keempat, Ada kecenderungan dengan makin banyak anggota rumah tangga, maka indeks kebahagiaan cenderung semakin tinggi. Namun, ketika jumlah anggota rumah tangga meningkat menjadi 7 ataulebih, maka indeks kebahagiaan cenderung menurun.
- Kelima, Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula indeks kebahagiaan. Penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mempunyai indeks kebahagiaan paling rendah, sementara indeks kebahagiaan tertinggi pada penduduk dengan tingkat pendidikan S2

atau S3.

- Dan Keenam, Semakin tinggi rata-rata pendapatan rumah tangga, semakin tinggi pula indeks kebahagiaannya. Pada tingkat pendapatan lebih dari 7,2 juta rupiah per bulan, indeks kebahagiaannya mencapai 80,05, sementara pada tingkat pendapatan 1,8 juta rupiah ke bawah maka indeks kebahagiannya hanya 66,47.

Pemikiran konvensional tentang kesejahteraan lebih banyak bertujuan pada terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam hal materi, kesejahteraan spiritual agaknya mendapatkan porsi perhatian yang lebih sedikit dariparda kesejahteraan yang bersifat spiritual, hal ini bisa dilihat dari penjelasan Badan Pusat Statistik (2000) yang menyatakan bahwa ada beberapa indicator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga di antaranya adalah tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Sugiharto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempa tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Selain itu, Kakisina juga menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, dia menyimpulkan bahwa factor-faktor yang mempunyai korelasi positif dengan tingkat pendapatan adalah tingkat pendidikan, jjumlah beban tanggungan, biaya produksi, luas llahan yang dimiliki, luas lahan yang diusahakan, pendapatan dari

tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, dan pendapatan PNS. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga antara lain pendapatan dari tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, peternakan, perikanan, pendapatan industry, pendapatan dagang, pendapatan PNS dan pendapatan dari karyawan swasta.

Penjelasan yang lebih detail disampaikan oleh Sunarti yang menegaskan bahwa aspek-aspek spesifik yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah: Pertama, Kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan fertilitas. Kedua, Kesehatan, yang meliputi tingkat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita. Ketiga, Pendidikan, yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas pendidikan. Kempat Ketenagakerjaan, yang meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja dan pekerjaan anak. Kelima, Pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, yang meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan). Keenam, Perumahan dan Lingkungan, yang meliputi kualitas rumah (tempat tinggal), fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan. Ketujuh, Sosial budaya, yang meliputi akses untuk memperoleh informasi dan hiburan, dan kegiata susial budaya.

2. Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya sangat mengharapkan umat manusia untuk

memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.[17]

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah Swt meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi Saw bersabda: "Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.[18]"

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indicator kesejahteraan

---

[17] Darsyaf Ibnu Samsudin, Darussalam, *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994) 66-68

[18] Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid II (*Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 314-315.

dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indicator kegagalan system ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allaj Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga criteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah dimuka bumi dimana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral meupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Dalam kosep ekonomi Islam, uang adalah barang public, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang

dalam Islam.

Alqur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surah An-Nahl ayat 71 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar membangun konsep ekonomi kerakyatan dalam Islam. Adapun ayat tersebut:

وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزۡقِهِمۡ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَهُمۡ فِيهِ سَوَآءٌۚ أَفَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ٧١

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budakbudak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. (Q.S AnNahl:71)[19]

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari keadilan dalam distribusi kekayaan, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Ayat ini menjadi indikator bahwa kesejahteraan sejati tercapai ketika tidak ada kesenjangan sosial yang mencolok dan semua orang mendapatkan hak-hak dasarnya.

Indicator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indicator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indicator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indicator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan

[19] Alqur'an surat anNahl ayat 71

negara paling aman di dunia.

Indicator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indicator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi, Zuhaili (1985: 8) menjelaskan bahwa ketika Saad bin Abi Waqash r.a. ingin mewasiatkan duapertiga dari hartanya padahal ketika itu tidak ada yang mewarisi hartanya kecuali hanya seorang putrinya, kemudian Rasulullah Saw. Pun bersabda “Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain” (HR. Jamaah).[20]

3. Kesejahteraan Di Masa Rasulullah dan Sahabatnya

Ajaran ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari sumber utamanya, yakni Al-Qur'an, Sunnah, dan khazanah Islam lainnya. Konsep- konsep ekonomi Islam

[20] Equilibrium. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.* Volume 3 NO 2. Desember 2015

yang didalamnya membahas tentang kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, dan negara telah tergambar secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi telah terwujud dalam praktek kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Implementasi nilai-nilai kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saat itu tetapi juga umat non muslim, bahkan rahmat bagi seluruh alam hingga masa modern saat ini. Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah Saw. membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah Saw di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.[21]"

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain, syirkah, qirad, dan khiyar dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan sistem musāgāh, mukhābarah, dan muzāra'ah dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan dalam berdagang. Semenjak hijrah ke Madinah, kehidupan telah banyak berubah. Para sahabat Nabi Muhammad Saw dari kaum Muhajirin bahu membahu dengan penduduk lokal Madinah dari kaum Anshar dalam membangun kegiatan ekonomi. Berbagai bidang digeluti oleh beliau dan para sahabatnya, baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan maupun peternakan. Pasar-pasar dibangun di Madinah. Kebun-kebun kurma menghasilkan panenan yang melimpah. Peternakan kambing menghasilkan susu yang siap dipasarkan maupun hanya sekedar untuk diminum. Dalam sejarah, dikenal tokoh Islam yang terkenal dengan kekayaannya dan kepiawaiannya dalam berdagang dan berbagai bidang lainnya. Mereka adalah Abdurahman bin Awf, Abū Bakr, 'Umar bin Khattab, dan sebagainya. Mereka sadar akan dapat hidup di Madinah hanya dengan usaha mereka sendiri. Masyarakat Madinah terus berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi dengan etos kerja yang tinggi. Ibadah dan kerja adalah dua jenis aktivitas ukhrawi dan duniawi yang menghiasi

[21] Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 223. Muhammad Sholahuddin, World Revolution With Muhammad (Sidoarjo: Mashun, 2009), 46.

hari- hari mereka silih berganti. Pada awal tahun kedua Hijrah, Allah swt sudah mewajibkan kaum muslimin membayar zakat. [22]Tentu

4. Kesejahteraan UMKM

Kesejahteraan UMKM adalah kondisi yang mencerminkan tercapainya taraf hidup yang layak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik secara ekonomi maupun sosial, melalui peningkatan kapasitas usaha, pendapatan yang stabil, dan akses terhadap sumber daya yang mendukung keberlanjutan usaha. Dalam konteks penelitian ini, kesejahteraan UMKM tidak hanya dipandang dari segi finansial semata, tetapi juga meliputi aspek-aspek seperti kemampuan mengakses pelatihan dan pendampingan, memperoleh perlindungan usaha, serta memiliki daya saing dalam pasar.

Kesejahteraan pelaku UMKM juga dapat tercermin dari kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan produktivitas usaha, serta mencapai kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan UMKM menjadi fokus penting bagi pemerintah daerah, khususnya melalui peran instansi seperti Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dalam memberikan pelatihan, fasilitasi permodalan, dan pembukaan akses pasar.

Kesejahteraan UMKM sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial suatu negara. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.Kesejahteraan UMKM dalam Konteks Perekonomian:

- Peningkatan Pendapatan dan Penghasilan,.

  UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan usaha mandiri.
- Peningkatan Kualitas Hidup.

  Kesejahteraan UMKM tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
- Pemerataan Ekonomi.

  UMKM dalam pemerataan ekonomi di daerah-daerah yang mungkin terpinggirkan oleh perkembangan ekonomi.

[22] Muhammad Husein Haikal , *Sejarah Hidup Muhammad (Jakarta : Litera Antara Nusa,* 1989,) hal 197

- Penciptaan Lapangan Kerja.

  UMKM penyumbang lapangan kerja terbesar di banyak negara, terutama di sektor informal.

- Peningkatan Daya Saing:

  Pengembangan UMKM dapat meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara secara keseluruhan.

  Kesejahteraan UMKM sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial suatu negara. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan UMKM:

- Akses ke Pasar dan Distribusi.

  UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam memasarkan produk mereka dan mendistribusikannya secara luas.

- Akses ke Modal.

  Keterbatasan modal seringkali menjadi hambatan bagi pertumbuhan UMKM.

- Peningkatan Keterampilan.

  Keterampilan manajerial dan teknis yang terbatas dapat menghambat pengembangan UMKM.

- Dukungan Pemerintah.

  Kebijakan pemerintah, termasuk akses ke pembiayaan, pelatihan, dan infrastruktur, sangat penting bagi kesejahteraan UMKM.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil peninjauan penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa pembahasan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Oleh karena itu, untuk menghindari plagiat dan menjadi sumber rujukan. Maka penulis perlu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis sedang lakukan, diantaranya sebagai berikut:

Gendia Saumy Lathifah dan Ilham Dwi Prayoga dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19" menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 di Indonesia telah melumpuhkan perekonomian Indonesia, banyak UMKM yang bangkrut karena pendapatannya menurun, dan banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa kebijakan pemerintah dalama upaya penyelamatan perekonomian di masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

R. Didy Djadjuli dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah" menyatakan Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya, banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonominya yaitu ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Pengawasan secara berkala.

Ramli Hatma (Jurnal) 2021, dengan judul Peningkatan Kapasitas Pengolahan UMKM Usaha Pengolahan Ikan Asin di Kelurahan Mamboro Barat kecamatan Palu Utara Kota Palu. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan dimana

penelitian ini langsung terjun ke dalam masyarakat, focus penelitiannya mengenai UMKM ikan asin. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah dimana penelitian terdahulu membuat metode seperti metode pelatihan guna untuk meningkatkan kualitas SDM dan pemberian materi.[23]

Talim Sumarno (Jurnal) 2020, dengan judul Strategi Pengembangan Mutu Ikan Asin Jambal Roti (Ikan Manyung) di Karongsang Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Persamaan dari penelitian ini adalah dimana penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yang mana penelitian langsung ke masyarakat dan penelitian ini juga membahas cara peningkatan mutu ikan asin dan UMKM. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dimana fokus penelitian adalah hanya usaha perorangan dan bukan kelompok.[24]

Dina Camelia & Ahmad Ajib Ridlwan (Jurnal) 2018, dengan judul Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional KetapangSampang. Metode penelitian yang dilakukan peneletian kualitatif. Yang membedakan penelitian tersebut terletak pada pembiayaan murabahah berperan dalam perkembangan usaha dan kesejahteraanpelaku usaha mikro kecil dan menengah di pasar tradisional sedangkan dilokasi penelitian penulis tepatnya di Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal terletak pada peran pelaku Umkm dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam mengurangi pengangguran.[25]

---

[23] Ramli Hatma, *Peningkatan Kapasitas Pengolahan UMKM Usaha Pengolahan Ikan Asin di Kelurahan Mamboro Barat kecamatan Palu Utara Kota Palu*, Jurnal Pengabdian MasyarkatVolume 9, No. 2, November 2021. 2021. P-ISSN : 2302-2051, hlm. 73-77.

[24] Talim Sumarno, *Strategi Pengembangan Mutu Ikan Asin Jambal Roti (Ikan Manyung) di Karongsang Kabupaten Indramayu*, JPHPI 2020. Volume 23. No. 2, hlm. 196-205.

[25] Dina Camelia & Ahmad Ajib Ridlwan, *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional di Ketapang- Sampang*, Jurnal Ekonomi Islam,Volume 1 No 3, 2018, hlm 195-204.

Anggia Sari Lubis (Jurnal) 2021, dengan judul Usaha Mikro Kecildan Menengah (UMKM) di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan metode penelitian kualitatif.Yang membedakan penelitian tersebut terletak pada keberadaan UMKM mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan mampu mengurangi pengangguran di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan dilokasi penelitian penulis tepatnya di Desa Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal mendapati hal sebaliknya, dimana keberadaan UMKM belum sepenuhnya dapat untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan masih banyak pengangguran.[26]

[26] Anggia Sari Lubis, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 6, No. 1, Mei 2021, hlm. 32-38.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berbagai macam metode dapat digunakan untuk memberikan arahan bagi peneliti untuk memudahkan jalannya penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.[27].

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitati merupakan bagian yang terpanjang yang berisi semua peristiwa dan pengalaman yang didengar dan yang dilihat serta dicatat selengkap dan seobjektif mungkin. Catatan deskriptif lebih memfokuskan dalam mengambil gambar, orang, perbuatan, dan percakapan yang diamati.[28]

Berdasarkan definisi tersebut, penelitian dengan pendekatan deskriptif disimpulkan merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis secara jelas mengenai fakta atau keadaan yang terjadi pada suatu objek yang diteliti.

Sesuai dengan beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian dengan uraian yang sistematis, faktual, akurat, dan jelas. Dengan demikian, penelitian

[27] Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak 2018). Hlm. 8
[28] Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak 2018). Hlm. 202

tentang “Peran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Bukittinggi" cocok dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   lokasi penelitian adalah tempat ketika akan diadakan nya sebuah penelitian/observasi dalam rangka untuk memperoleh sebuah data yang akurat untuk sebuah penelitian. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh, oleh karena itu lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi sama artinya dengan tempat atau letak. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian atau peninjauan masalah-masalah yang akan diteliti.

   Adapun Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Koperasi, UKM can Tenaga Kerja Bukittinggi. Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah Kota Bukittinggi.

2. Waktu Penelitian

   Waktu penelitian merupakan rentang masa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan sebuah observasi dan penggalian data selama di lapangan. Lamanya waktu penelitian ditentukan sendiri oleh seorang peneliti sesuai dengan kebutuhannya. Dalam penelitian ini, waktu penelitian yang di lakukan oleh peneliti yaitu pada November 2024 sampai dengan selesai.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yakni data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mendeskrepsikan mengeksplorasi, mendeskrepsikan dan menjelaskan. Tujuan lainnya adalah berkaitan dengan tindakan, anjuran atau perbuatan yang sering menjadi tujuan akhir dalam penelitian.[29] Data kualitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini di golongkan menjadi dua kelompok, yaitu:

a) Data Primer.

Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Penentuan pemilihan pihak tersebut dengan cara memilih orang-orang/informan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubunganya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dapat pula berasal dari lapangan.[30] Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer langsung dari lapangan, yakni dengan cara wawancara kepada karyawan pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi serta kepada pelaku usaha IKM Kota Bukittinggi. Beberapa contoh data primer adalah seperti hasil wawancara, data hasil survei dan data kuisioner.[31]

Menurut Umi Narimawati data primer adalah “data yang

---

[29] Fathor Sosyid. *Metodologi penelitian Sosial Teori & Praktik* (Kediri: Stain Kediri Press, 2015) hal 276.
[30] Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis(* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal 57
[31] Nunung Indah Pratiwi. *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,* jurnal ilmiah Dinamika Sosial Vol 1 No 1 (2017) hal 204

berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yangkita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Adapun ciri-ciri data primer adalah sebagai berikut:

1) Data yang dikumpulkan secara langsung.
2) Data yang belum pernah dipublikasikan.
3) Data yang dikumpulkan untuk tujuan penelitian
4) Data yang memiliki tingkat ketepatan yang tinggi.
5) Data yang dapat diuji validitasnya.
6) Data primer dapat diuji validitasny dengan menggunakan metode statistik.

b) Data Sekunder.

Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.[32] Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumenresmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan peternakan burung puyuh, kantor kelurahan desa keling, jurnal, skripsi, serta data lainya yang dapat membantu agar data menjadi relevan.

Menurut Sugiyono data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data

[32] Moh. Pabundu Tika *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). Hal 58

sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, catatan, laporan rencana strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi yang dapat memberikan informasi terkait dengan masalah penelitian. Adapun ciri-ciri datsa sekunder adalah:

1) Data yang sudah ada dipublikasikan.
2) Data yang dikumpulkan oleh orang lain.
3) Data digunakan untuk analisis pervandingan.

Adapun sumber data

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain.. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh". Jadi sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Pada penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto adalah sumber data yang berawal dari *person, place paper.*[33]Person, sumber data berupa orang, yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban

[33] Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, (2002), 114

lisan melalui wawancara dan sumber data utama yang berupa wawancara dalam penelitian ini adalah kepala karyawan pada Dinas Kopwrasin UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi serta para pelaku usaha Industri Kecil Menengah Kota Bukittinggi.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.[34] Terdapat berbagai cara untuk melakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi adalah metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observsi didalamnya. Observasi menjadi bagian dalam penelitian.,dapat berlansung dalam konteks laboratorium maupun dalam konteks alamiah.

Menurut Widoyoko observasi merupaka “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Menurut Sugiyono “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

[34] Sugiyono. *Metodologi penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R DAN D. (Bandung:Alfabeta:2011)hlm,224.*

yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis". Menurut Riyanto "observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung:. Berdasarkan penjelasan para ahli, disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari pelbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Tujuan digunakannya observasi sebgai metode penelitian diantaranya untuk mengetahui perilaku siswa ketika berada di sekolah dan di rumah. Selain itu, tujuan observasi yaitu untuk mengetahui bentuk bimbingan yang diberikan oleh guru dan orang tua kepada siswa yang berperilaku agresif.

Dalam penelitian ini peneliti dalam melakukan observasi melakukan dalam konteks alamiah karena jenis penelitian penulis kualitatif. Pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data dilakukan dengan mengamati, mencatat kejadian-kejadian melalui cara sistematis, observas langsung memberikan sumbangan yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. [35]

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung atau wawancara

[35] Kholid dan Nurkobo Dan Ahmad, *Metode Penelitian,*(Jakarta: PT Bumi Aksara,1997).hlm,94

membutuhkan alat yang dinamakan panduan wawancara untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian.[36]

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini digunakan apabila subyek penelitian (responden) dan peneliti berhadapan langsung dalam proses perolehan informasi untuk keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait fakta, keyakinan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.

Wawancara membutuhkan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat. [37] Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya pewawancara semestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian (responden). Dukungan dari para responden tergantung dari bagaimana peneliti melaksanakan tugasnya, karena tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data dan data-data ini diperlukan untuk membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian. Sebenarnya aturan wawancara ini bukanlah hal yang bisa dipelajari dari buku atau dari

---

[36] Mita Rosaliza. *Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.* Jurnal Ilmnu Budaya, Vol 11No 2 (Februari, 20915) hal 2

[37] Newman, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* (Jakarta: 493)

para pakar saja, karena wawancara tergantung dari kondisi, keadaan atau situasi. Mungkin kita pernah berpendapat bahwa seorang yang ramah akan dengan mudah menjalankan wawancara tanpa menjalani latihan secara formal. Namun sangat wajar bila dikatakan bahwa kualitas wawancara oleh peneliti (interviewer) akan bertambah baik dengan bertambahnya pengalaman.[38]

Oleh karena itu dalam proses pengumpulan data dalam melakukan penelitian sosial terdapat beberapa cara dan prinsip yang harus diketahui dan dilakukan oleh seorang interviewer.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.[39]

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan,

---

[38] Mita Rosaliza, *Wawancara sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, jurnal Ilmu Budaya* Vol 11 (2015) halaman 72

[39] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal 118

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.[40]

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti : gambaran umum sekolah, struktur organisasi sekolah dan personalia, keadaan guru dan peserta didik, catatan-catatan, foto-foto dan lainnya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

[40] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. (*Bandung: Alfabeta. 2011, hal 240

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja (DKUKMTK) Kota Bukittinggi merupakan salah satu perangkat daerah Kota Bukittinggi yang membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. DKUKMTK dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.DKUKMTK mendukung visi Walikota Bukittinggi, yaitu Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, dan mendukung Misi ke-1 (satu) yaitu "HEBAT" Dalam Sektor Ekonomi Kerakyatan.

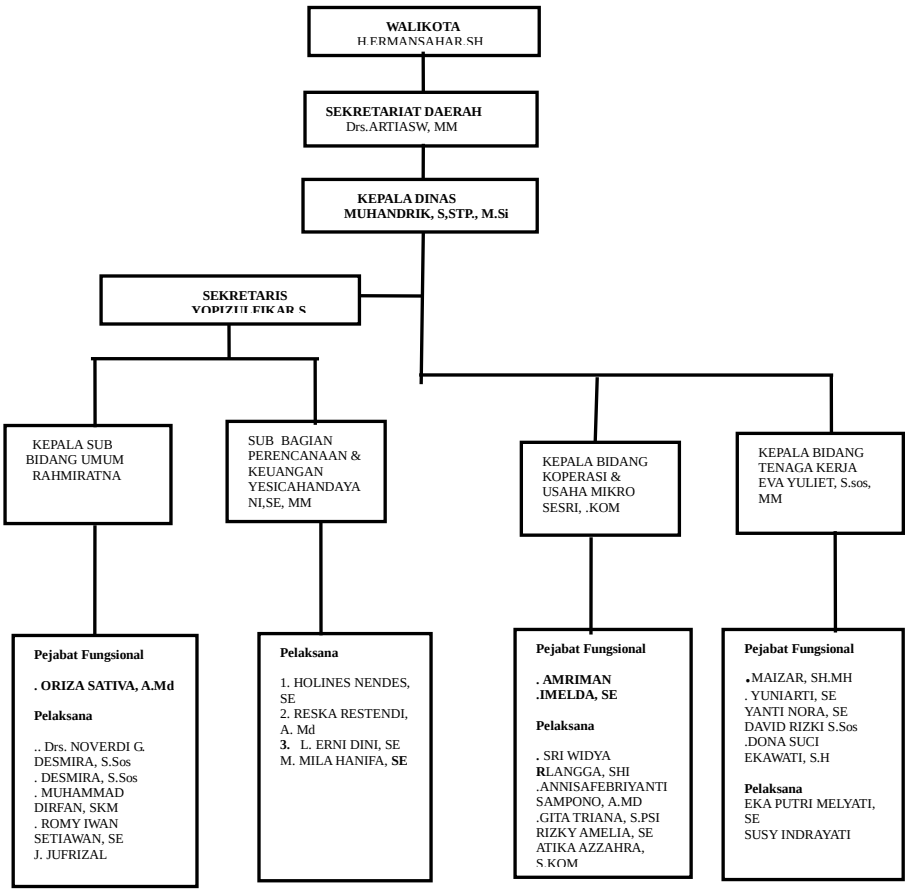
2. Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2022, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja
c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha
d. kecil dan menengah dan tenaga kerja
e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
g. Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas, dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Ukm dan Tenaga Kerja Bukittinggi



Sumber: Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Teanaga Kerja Bukittinggi.[41]

Dari penjelasan di atas, dapat di uraikan tugas dan fungsi masing-masing Bidang sebagai brikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas
2) Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja
3) Penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan

[41] Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah dan Tenaga Kerja Bukittinggi

menengah dan tenaga kerja

4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
6) Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik Daerah;
4) Pembinaan aparatur;
5) Pengelolaan urusan kepegawaian;
6) Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan urusan persuratan;
2) Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4) Pelaksanaan pengelolan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;

5) Penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur administrasi jabatan fungsional dan
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja dan melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi danpembukuan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
2) Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
3) penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
4) Penyiapan bahan penyusunan rancangan peratuan perundangan
5) Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian
6) Pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
7) Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan;
8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
10) Pimpinan.

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi serta bidang usaha mikro kecil dan menengah. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

1) Verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat

2) Pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin-izin usaha Koperasi.
3) Pengkoordinasian pembentukan, perubahan anggaran dan pembubaran koperasi
4) Pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi, serta pembinaan dan bimbingan teknis anggota dan perangkat organisasi koperasi
5) Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) kota
6) Pengkoordinasian penilaian penyediaan data kesehatan koperasi
7) Pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi
8) Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan, perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi
9) Promosi akses pasar bagi produk koperasi
10) Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi
11) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
12) Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlidungan usaha mikro;
13) Promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
14) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
15) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
16) Pengkoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
17) Pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
18) Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

f. Bidang Tenaga Kerja

Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Tenaga Kerja melaksanakan fungsi:

1) Perumusan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program data dan pelayanan tenaga kerja.
2) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman penyelenggaraan bidang program ketenagakerjaan sesuai urusan / kewenangan pemerintah daerah
3) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi ketenagakerjaan dan pelayanan.
4) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan program ketenagakerjaan.
5) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang ketenagakerjaan sesuai dengan norma dan standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
6) Pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program atau kegiatan/tugas bidang ketenaga kerjaan.
7) Melaksanakan kegiatan koordinasi pelatihan dan penyuluhan ketenagakerjaan dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas.
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Peran Dinas Koperasi Ukm dan Tenaga Kerja Bukittinggi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota Bukittinggi

Berdasarkan penelitian hasil penelitian yang telah dilakukan, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi memiliki beberapa peran dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Kota Bukittinggi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan dan edukasi terhadap pelaku UMKM

   Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan diketahui bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi memiliki peran strategis dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan sektor UMKM. Dalam konteks ekonomi lokal UMKM merupakan tulang punggung perekonomian mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelaku UMKM menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah melalui penyelenggaraan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku UMKM.

Pelatihan tersebut bertujuan agar usaha yang dijalankan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang secara optimal dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor,khususnya dengan pemerintah daerah, termasuk keterlibatan langsung dari Wali Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan pelatihan tidak hanya dilakukan di lokasi formal seperti hotel-hotel di Kota Bukittinggi, tetapi juga di luar kota, seperti di Padang, yang menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang luas dan berkualitas bagi pelaku UMKM.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu pelaku UMKM yang telah melakukan pelatihan bersama Dinas UKM dan Tenaga kerja Bukittinggi diketahui bahwa pelatihan yang diterimanya membawa dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usahanya. Sebelum mengikuti pelatihan, pelaku UMKM tersebut hanya memasarkan produknya secara konvensional, yakni melalui penjualan langsung dari rumah dan dengan menitipkan barang dagangan ke warung-warung sekitar. Pola pemasaran tradisional ini memiliki keterbatasan

jangkauan, sehingga potensi pertumbuhan usaha pun menjadi terhambat. Namun, setelah mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh dinas, pelaku UMKM mulai memahami pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas pasar.

Pelatihan tersebut membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai penggunaan media sosial dan *platform e-commerce* untuk pemasaran produk. Hasilnya, pelaku usaha ini kini telah memiliki akun Instagram bisnis dan aktif memasarkan produknya melalui *platform Shopee.* Inovasi dalam strategi pemasaran ini secara langsung berdampak pada peningkatan volume penjualan serta perluasan jaringan konsumen, termasuk diperolehnya pesanan dari luar wilayah Kota Bukittinggi. Adapun pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pelatihan Yang Di Adakan Oleh Dinas Koperasi UKM Dan Tenaga Kerja Bukittinggi

No	Nama Pelatihan	Waktu Melakukan Pelatihan
1	Kewirausahaan	10-13 Februari 2022
2	Manajemen Usaha	20 Desember 2022
3	Digital Marketting	
4	Sumber Modal	22-25 Januari 2023
5	Pelatihan Keamanan Pangan Los Lambuang	25 Juni 2024
6	Pelatihan Milenial Angkatan Ke-3	19- 21 Agustus 2024

2. Membantu Mempromosi kan Produk Buatan UMKM

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan menyatakan bahwa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja Kota

Bukittinggi menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal, yang mana salah satunya adalah dengan melalui strategi promosi berbasis penggunaan langsung produk binaan. Salah satu bentuk konkret dari strategi ini adalah pemanfaatan hasil karya pelaku UMKM, seperti batik lokal, dalam berbagai kegiatan dan acara resmi pemerintah. Langkah ini bukan sekadar simbolik, melainkan merupakan strategi promosi aktif yang memiliki dampak psikologis dan ekonomis bagi pelaku UMKM.

Dengan mengenakan produk lokal dalam forum publik, Dinas tidak hanya memperkenalkan kualitas dan keunikan produk UMKM kepada masyarakat luas, tetapi juga membangun citra positif terhadap hasil karya para pelaku usaha kecil. Hal ini menciptakan rasa bangga dan dihargai di kalangan pelaku UMKM, yang pada akhirnya memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi produknya. Selain itu, tindakan ini turut memperkuat identitas lokal dan mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif di tingkat daerah.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari beberapa pelaku UMKM, mereka mengaku merasa sangat dihargai ketika melihat hasil karya mereka, seperti batik, digunakan oleh pejabat dan staf dinas dalam berbagai acara formal. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan tersendiri, yang berdampak positif terhadap motivasi mereka dalam menjalankan usaha.

Selain dampak psikologis berupa penghargaan moral dan penguatan identitas sebagai pengrajin lokal, para pelaku UMKM juga merasakan dampak ekonomis. Mereka mengungkapkan bahwa setelah produk mereka dikenakan dalam forum publik, permintaan terhadap produk tersebut mengalami peningkatan. Masyarakat mulai tertarik dan penasaran terhadap produk lokal yang ditampilkan, sehingga mendorong peningkatan penjualan dan memperluas jaringan konsumen. Lebih jauh lagi, beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa mereka mulai mendapat pesanan dari instansi lain atau komunitas yang sebelumnya tidak mengenal produk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan produk UMKM dalam konteks resmi oleh dinas tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menjadi strategi promosi yang efektif untuk memperluas akses pasar UMKM.

3. Mendukung Permodalan UMKM Melalui Program Tabungan

Ustman.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam mendukung permodalan bagi pelaku UMKM adalah menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan lokal, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jam Gadang. Melalui kerja sama ini, dinas turut mendorong pelaksanaan program Tabungan Utsman, yaitu sebuah skema pembiayaan berbasis syariah yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses modal bagi masyarakat pelaku usaha kecil. Program Tabungan Utsman memiliki mekanisme yang unik dan inklusif, di mana masyarakat yang tergabung dalam program ini dapat menabung sambil memperoleh pinjaman di muka. Sistem ini memungkinkan nasabah menerima dana pinjaman terlebih dahulu, yang kemudian dibayarkan kembali melalui setoran harian yang hanya mencakup cicilan pokok pinjaman, tanpa adanya tambahan bunga.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menghindari praktik riba. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah melalui dinas terkait berusaha menciptakan ekosistem keuangan yang adil dan ramah bagi pelaku UMKM, khususnya mereka yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas usaha mikro, tetapi juga turut mendorong peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan seorang pelaku UMKM mengungkapkan bahwa melalui program Tabungan Utsman, ia mampu memperoleh tambahan modal usaha dengan sistem yang ringan dan tidak memberatkan. Nasabah tidak dikenakan bunga dalam bentuk apa pun, melainkan hanya diminta untuk menabung cicilan pokok setiap hari. Mekanisme ini dirasa sangat membantu, terutama bagi pelaku usaha kecil yang

pendapatannya bersifat harian dan fluktuatif. Ia juga merasa tenang karena pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah, yang bebas dari unsur riba dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Tidak hanya memperoleh modal, pelaku UMKM tersebut juga merasakan adanya peningkatan pemahaman terkait pengelolaan keuangan usaha secara islami. Hal ini memperkuat komitmennya untuk menjalankan usaha dengan lebih profesional dan beretika. Program Tabungan Utsman bukan hanya memberikan akses dana, tetapi juga mendorong kedisiplinan dalam menabung serta tanggung jawab dalam mengelola pinjaman.

Secara umum, pengalaman pelaku UMKM ini menunjukkan bahwa Tabungan Utsman telah memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha mikro. Program ini dinilai efektif dalam menjawab kebutuhan modal dengan pendekatan yang lebih manusiawi, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat lokal.

4. Melakukan Pengawasan bagi UMKM di Kota Bukittinggi

Pengawasan juga menjadi bagian integral dalam strategi pengembangan UMKM. Pengawasan ini dilaksanakan melalui peninjauan langsung terhadap perkembangan usaha setelah pelaku UMKM mengikuti pelatihan atau sosialisasi. Fokus pengawasan mencakup kualitas bahan baku yang digunakan, kemajuan produksi, serta kesesuaian pelaksanaan usaha dengan standar dan pengetahuan yang telah diberikan. Evaluasi ini menjadi tolok ukur untuk memastikan bahwa program pembinaan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah mengikuti program pelatihan dan pembinaan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan

usaha mereka. Pelaku UMKM memperoleh pengetahuan baru dalam pengelolaan usaha, mulai dari manajemen keuangan, strategi pemasaran, hingga peningkatan kualitas produk. Pelatihan yang diberikan sangat membantu dalam memperbaiki proses produksi dan memperkuat pemahaman terhadap pentingnya standarisasi produk. Ia juga menuturkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dinas membuka wawasannya tentang perizinan usaha, hak kekayaan intelektual, serta pentingnya memiliki legalitas usaha untuk memperluas akses pasar.

Pelaku UMKM juga merasakan manfaat dari adanya proses pengawasan yang dilakukan dinas. Melalui peninjauan langsung terhadap perkembangan usaha, mereka mendapatkan masukan konstruktif terkait aspek yang perlu ditingkatkan, termasuk dalam hal pemilihan bahan baku, teknik produksi, dan pengemasan produk. Evaluasi ini tidak hanya menjadi bentuk kontrol, tetapi juga sarana pembelajaran yang memperkuat kualitas usaha secara keseluruhan.

C. Kendala dan Solusi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi Selama Menjalankan Perannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku UMKM di Kota Bukittinggi, kebutuhan akan monitoring dan pembinaan yang intensif juga turut meningkat.

Namun, hal ini belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh dinas karena jumlah petugas lapangan yang tersedia masih terbatas. Keterbatasan tenaga operasional berdampak pada frekuensi dan jangkauan monitoring yang dapat dilakukan oleh dinas. Dalam praktiknya, proses pendampingan dan pengawasan terhadap pelaku UMKM tidak dapat dilakukan secara rutin menyeluruh. Monitoring

baru dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau dalam skala prioritas yang terbatas, seperti kepada pelaku UMKM yang baru mendapatkan bantuan atau pembinaan awal.

Menyebabkan adanya ketimpangan dalam pemerataan pendampingan terhadap seluruh pelaku usaha yang membutuhkan bimbingan lanjutan.Kondisi ini tentu berimplikasi terhadap efektivitas program pembinaan dan pengembangan UMKM secara keseluruhan. Kurangnya monitoring berkala mengakibatkan dinas kesulitan dalam mengevaluasi secara langsung perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di lapangan. Akibatnya, intervensi yang diberikan dinas sering kali bersifat reaktif dan kurang berbasis data terkini dari kondisi riil di lapangan.

Solusi yang dapat diterapkan adalah membangun kerja sama dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun sektor swasta. Kolaborasi ini memungkinkan dinas untuk memanfaatkan sumber daya eksternal dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan UMKM. Bentuk kerja sama dapat diwujudkan melalui program pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, serta pendampingan teknis dan manajerial bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Adapun solusi lainnya yang dapat di terapkan adalah melatih dan melibatkan kader atau relawan lokal sebagai mitra monitoring di lapangan. Kader ini dapat berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa magang dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat, maupun anggota koperasi yang telah memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap dunia usaha mikro dan kecil. Mereka dapat berperan sebagai perpanjangan tangan dinas dalam melakukan pendampingan, pemantauan, serta pelaporan kondisi UMKM di wilayah masing-masing.Selain memperkuat sistem monitoring, strategi ini juga memberikan manfaat tambahan berupa pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan agen-agen perubahan di masyarakat.

Dengan demikian, pelibatan kader dan relawan lokal menjadi solusi strategis yang tidak hanya menjawab keterbatasan SDM dinas, tetapi juga mendukung penguatan ekosistem UMKM yang partisipatif dan berkelanjutan di Kota Bukittinggi.

Dinas dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah penambahan alokasi anggaran guna merekrut tenaga pendamping lapangan tambahan atau konsultan ahli. Penambahan ini dapat dilakukan secara permanen melalui pengangkatan tenaga fungsional baru, maupun secara fleksibel berbasis proyek atau kontrak jangka pendek, sesuai dengan kebutuhan pembinaan di lapangan. Tenaga pendamping yang direkrut diharapkan memiliki kompetensi dalam bidang manajemen usaha, pemasaran, keuangan, maupun digitalisasi, sehingga dapat memberikan bimbingan yang lebih spesifik dan relevan bagi pelaku UMKM. Penguatan anggaran ini tidak hanya bertujuan untuk menambah jumlah tenaga pelaksana, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan pembinaan yang diberikan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, dinas dapat menjalankan program penyuluhan secara lebih terstruktur, terjadwal, dan merata di berbagai wilayah. Selain itu, keberadaan konsultan ahli juga dapat membantu dalam penyusunan strategi pengembangan UMKM yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dinas dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada UMKM, sekaligus mendukung terwujudnya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing di Kota Bukittinggi. Pemanfaatan Layanan Konsultasi Digital sebagai Alternatif Pendampingan UMKM di Tengah Keterbatasan SDM.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan pembinaan, pelatihan, penyuluhan, serta dukungan pemasaran secara offline maupun online. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi pelatihan digital marketing, penggunaan marketplace, penyuluhan langsung ke lapangan, serta promosi produk UMKM dengan menggunakan hasil karya mereka dalam kegiatan dinas secara resmi. Adapun peran memiliki tanggung jawab langsung dalam memberikan pelatihan, edukasi, serta pemberdayaan pelaku UMKM. Hal ini terbukti melalui program-program yang mendorong peningkatan kapasitas, daya saing, dan perluasan pasar UMKM, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi menghadapi kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM), yang berdampak pada terbatasnya frekuensi dan jangkauan pembinaan serta monitoring UMKM secara menyeluruh. Akibatnya, proses evaluasi dan pendampingan sering bersifat reaktif dan tidak merata. Sebagai solusi, dinas perlu menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi sektor swasta, serta melibatkan kader atau relawan lokal sebagai mitra pendamping untuk mendukung efektivitas pembinaan UMKM secara berkelanjutan.

B. Saran

1) Peningkatan SDM dan AnggaranPemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan lebih dalam bentuk penambahan tenaga

penyuluh lapangan maupun anggaran untuk mendukung program pendampingan UMKM secara lebih merata dan berkelanjutan.

2) Pemanfaatan Teknologi Secara MaksimalPerlu dikembangkan sistem monitoring berbasis digital yang lebih terstruktur dan terintegrasi, seperti aplikasi khusus untuk pelaku UMKM dalam melakukan pelaporan, konsultasi, dan promosi secara online.
3) Perluasan Program Pelatihan Pelatihan digital marketing dan pengembangan kapasitas usaha perlu diperluas cakupannya, dengan menggandeng lebih banyak narasumber ahli serta melibatkan instansi pendidikan dan swasta untuk memperkuat kolaborasi.
4) Pemberdayaan dan Jejaring UMKM Dinas dapat memfasilitasi terbentuknya komunitas atau forum UMKM di Kota Bukittinggi yang berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, pengalaman, dan membangun jejaring usaha antar pelaku UMKM.
5) Evaluasi dan Monitoring BerkalaDibutuhkan sistem evaluasi berkala terhadap program-program pembinaan dan pendampingan agar dapat diketahui efektivitasnya serta menjadi bahan perbaikan untuk program di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. 1992. *Pengantar Ilmu* (Bandung: IKIP Bandung)

Ade Resalawati. 2019 *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia.* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Adi Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosia (* Bandung: Refika Aditama)

Agung Eko Purwana. 2014. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Stain Ponorogo Vol. 11. No 1

Albi Anggito & Johan Setiawan. 2018 *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Sukabumi: CV Jejak)

Arifin Noor. 2021. *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU* (Bandung: CV Pustaka Setia)

Bachtiar Rifai. 2019. *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM*)" jurnal Sosio Humaniovora Vol.3 No.4

Darsyaf Ibnu Samsudin, Darussalam. 1994. *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994)

David Berry. 1995. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi,cet ke-3 (* Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Dina Camelia & Ahmad Ajib Ridlwan. 2020. *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional di Ketapang- Sampang*, Jurnal Ekonomi Islam,Vol 1 No 3

Fachri Yasin. 2002. *Petani Usaha Kecil dan Koperasi Bewawasan Ekonomi Kerakyatan* (Pekanbaru: Unri, 2002)

Fathor Sosyid. 2015. *Metodologi penelitian Sosial Teori dan Praktik* (Kediri: Stain Kediri Press)

Feni Dwi Anggraini, Imam Hardjanto. 2020 Hainul Hayat. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).* Jurnal Adminidtrasi Publik (JAP), Vol 1 No 6

Hermanita, SE. M.M Perekonomian Indonesia

Ika Niswatin Budiarti. 2024. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Dengan Memamfaatkan Potensi Sumber Daya Manusia Sumberdaya Alam Melalui Car Free Day Tebukayan di Tanjung Selor* Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 8 No. 1

Indrawan WS. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media)

Isnaini Haraharap. 2023. Signifikan Peranan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah. Volume 6 Nomor 2

Kholid dan Nurkobo Dan Ahmad,1977 *Metode Penelitian,*(Jakarta: PT Bumi Aksara)

Marsuki. 2006. *Pemikiran dan Strategi Memberdaykan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia.* (Jakarta: Mitra Wacana Medial)

Medriyansah. 2019. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol 6 No 1

Metode Penelitian Kualitatif @Syakir Media Press All right reserved

Mita Rosaliza. 2020. *Wawancara sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitati*f, Jurnal lmu Budaya Vol 3 No 1

Moh. Pabundu Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis (* Jakarta: PT Bumi Aksara)

Muhammad Husein Haikal. 1989. *Sejarah Hidup Muhammad (*Jakarta : Litera Antara Nusa)

Muhammad Sholahuddin, World Revolution With Muhammad. 2009. *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid 1* (Sidoarjo: Mashun)

Newman. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta)

Nunung Indah Pratiwi. 2021. *Ilmu Sosial*. Jurnal ilmiah Dinamika Sosial Vol 1 No 1

Nurul Husna. 2014. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Jurnal Italic, Volume 20,No. 29

Persada)

Profil Di AS koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi

Ramli Hatma. *2020. Peningkatan Kapasitas Pengolahan UMKM Usaha Pengolahan Ikan Asin di Kelurahan Mamboro Barat kecamatan Palu Utara Kota Palu*, Jurnal Pengabdian Masyarkat Vol 9, No. 2

Rintan Saragih. 2020. *Menelusuri Penyebab Lambayang Perkembangan UMKM di Desa Baru dan DusunTuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Kewirausahaan Vol. 5, No. 1

Rosni. 2017. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari SelebarKecamatanTalawi* Batubara. JurnalGeografi. Volume 9. No.1

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. 1988. *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid II (* Surabaya: Bina Ilmu)

Silahkan baca 3.1.1 Aeistoteles (384 SM - 322 SM)

Silvia SE. 2017 *e-Modul Direktorat Pembinaan SMA* (Jawa Barat)

Soerjono Soekanto, 2007 *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo

Sugiyono. 2020. *Metodologi penelitian Kuantitatif Kualitatif* . (Bandung: Alfabeta)

Suharsimi Arikunto. 2020. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta)

Taqiyuddin An-Nabani. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam terj. Moh Maghfur Wachid* (Surabaya: Risalah Gusti)

Taqiyuddin An-Nabani. 1996. *Membangun Sistem Ekonomni Alternatif PerspektifIslam* (Surabaya: Risalah Gusti)

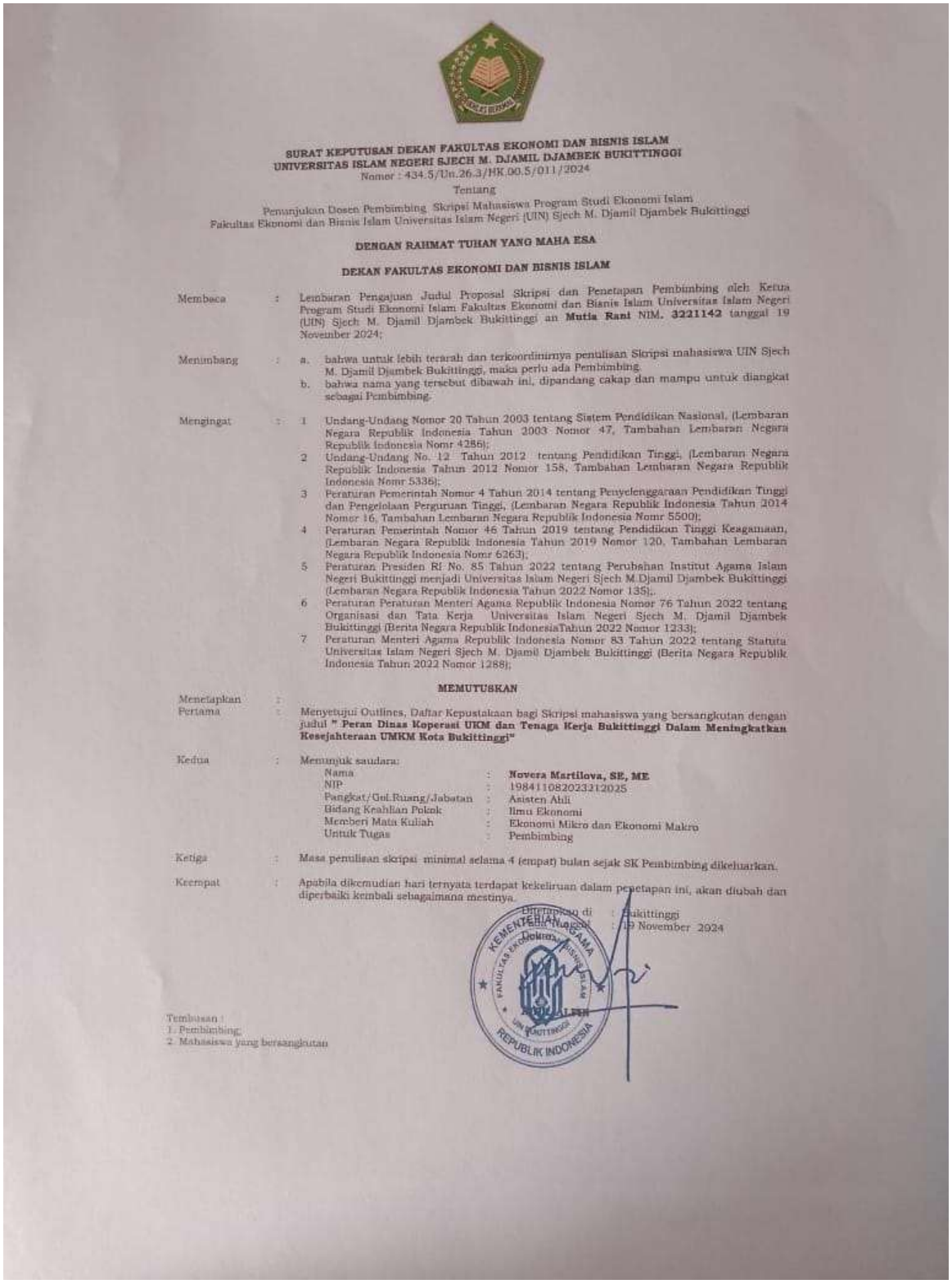
Tulus T.H Tambunan. 2019. *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia)

W.A Gerungan. 1998. *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Eresso)

Yusup Qardawi. 1977. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insan Pers

Zulkarnain. 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa)

Lampiran SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 434.5/Un.26.3/HK.00.5/011/2024

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Mutia Rani** NIM. **3221142** tanggal 19 November 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota Bukittinggi"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Novera Martilova, SE, ME**
NIP	:	198411082023212025
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 19 November 2024

Dekan,

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran: Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0839/Un.26.3/PP.07/05/2025 08 Mei 2025
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Mutia Rani**
NIM	: 3221142
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Bukittinggi"***
Lokasi Penelitian	: Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
Waktu	: 08 Mei s.d 08 Juni 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran Dokumentasi:

Wawancara dengan Ibu Rahmi Ratna Putri selaku Kepala Umum dan Kepegawaian inas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bukittinggi





Wawancra Dengan Ibu Atika Amelia selau Pejabat Fungsional Bidang Koperasi dan Usaha Mikro



Wawancara Dengan Ibu Annisa Febrianti Sampono, A. MD selaku pejabat FUNGSIONAL Bidang Kperasi Usaha Mikro:



Wawancara Dengan beberapa pelaku UMKM Kota Bukittinggi;



Daftar Riwayat Hidup



Nama panggila: Mutia Rani
Tempat / tanggal lahir : Solok Lambau / 14 Juli 2001
Alamat: Kubang Pipik
Prov. Sumatera Barat
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Nama ayah: Rafrial
Nama ibu : Noni Astuti
Pekerjaan ayah: Buruj
Pekerjaan ibu: IRT
Bersaudara :4 Orang
Pendidikan
1. Tahun 2007-2015 SD 18 Kubang Pipik
2. Tahun 2015-2018 MTS. S Kubang Piik
3. Tahun 2018-2021 Smk N 1 ampek angkek
4. Tahun 2021-2025 kuliah di UIN SMDD Bukittinggi